

Judul : Anggaran Dikdasmen 55,4 T, belum cukup atasi masalah pendidikan
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Anggaran Dikdasmen 55,4 T Belum Cukup Atasi Masalah Pendidikan



Lalu Hadrian Irfani

KOMISI X menyetujui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp 55,4 triliun pada 2026. Anggaran tersebut diharapkan bisa mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya mengapresiasi tambahan anggaran sebesar Rp 400 miliar dari rencana sebelumnya Rp 55 triliun. Anggaran tersebut masih belum cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia. "Masih banyak tantangan besar yang membutuhkan langkah cepat dan menyeluruh," kata Lalu di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Salah satu isu yang disorot adalah alokasi dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP). Lalu menegaskan, Fraksi PKB sejak awal mendorong agar bantuan pendidikan ini juga mencakup siswa taman kanak-kanak (TK), mengingat program wajib belajar nasional ditetapkan selama 13 tahun.

"Sayangnya, dalam rancangan anggaran yang disepakati, PIP untuk TK belum

masuk. Begitu juga penambahan nominal untuk SD dan SMP," ujarnya.

Selain itu, ia menyinggung persoalan kesejahteraan guru honorer yang hingga kini masih jauh dari layak. Masih ada guru yang hanya menerima Rp 300 ribu per bulan. "Mereka adalah pejuang pendidikan, tapi kesejahteraannya sangat minim. Kami meminta perhatian khusus Presiden agar di tahun 2026 tidak ada lagi guru yang digaji Rp 300 ribu," tegasnya.

Politisi PKB itu juga menyoroti kondisi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih banyak rusak parah bahkan tanpa fasilitas dasar seperti MCK. "Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh," tambah Ketua DPW PKB NTB itu.

Lalu menegaskan, Komisi X akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut agar kualitas pendidikan nasional meningkat. "Kami yakin selalu ada cahaya di ujung terowongan, dan itu menjadi motivasi kita bersama," pungkasnya.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri menambahkan, penggunaan anggaran bantuan pendidikan mesti dikawal agar benar-benar tepat sasaran. Fokus pengawasan ada pada guru honorer serta pelaksanaan PIP untuk jenjang PAUD dan TK. "Ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K, tapi belum teralokasikan. Informasi dari Mendikdasmen, itu dilakukan lewat mekanisme Transfer ke Daerah," jelasnya. ■ PYB